

Judul : Perkuat sistem keamanan siber, komisi I kebut bahas RUU KKS
Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Sistem Keamanan Siber

Komisi I Kebut Bahas RUU KKS

KOMISI I DPR tengah mempercepat pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Regulasi itu jadi langkah strategis buat memperkuat sistem keamanan siber nasional, terlebih di tengah peningkatan ancaman kejahatan digital.

Anggota Komisi I DPR Andina Thresia Narang menjelaskan, Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU KKS agar Indonesia punya payung hukum kokoh menghadapi perkembangan teknologi. Keamanan ruang siber kini jadi salah satu aspek utama dalam menjaga ketahanan serta pertahanan negara. "Makanya, penyelesaian pembahasan RUU KKS harus segera dituntaskan," ujarnya, kemarin.

Andina menambahkan, ancaman siber tidak lagi bersifat nasional melainkan telah berkembang luas jadi kejahatan lintas negara yang menyita perhatian banyak negara. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia tidak boleh tertinggal dalam membangun sistem keamanan siber nasional yang

tangguh dan kuat melalui regulasi komprehensif.

Katanya, banyak negara telah lebih dahulu menyiapkan perangkat hukum mereka sendiri, sehingga Indonesia juga harus bergerak cepat memiliki regulasi yang mampu menjawab seluruh tantangan nyata di ruang digital itu. "Kejahatan siber sudah resmi jadi persoalan internasional yang dihadapi dunia global," ucapnya.

Senada, anggota Komisi I DPR Slamet Ariyadi menekankan regulasi baru ini akan jadi landasan hukum kuat bagi negara dalam memperkuat upaya pencegahan berbagai serangan siber. Aturan itu sekaligus berfungsi penuh melindungi data strategis milik negara maupun data pribadi seluruh lapisan masyarakat.

Regulasi itu juga akan memperjelas seluruh pembagian tugas, fungsi, serta kewenangan penuh antarinstansi Pemerintah di Indonesia. Langkah strategis ini sengaja dirancang agar proses koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam menjaga keamanan siber nasional bisa berjalan dengan jauh



Andina Thresia

lebih efektif di lapangan nanti.

Slamet menegaskan, penyusunan RUU KKS akan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. "Komisi I akan menghimpun masukan dari lembaga negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga para pakar keamanan siber guna memperkaya seluruh substansi draf regulasi," katanya.

Berbagai pandangan masyarakat itu akan jadi referensi dalam pe-

nyusunan RUU KKS secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab segala kebutuhan nasional sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman siber dunia yang dinamis dan terus berubah setiap saat dari waktu ke waktu.

Mastukan dari berbagai pihak dipastikan akan jadi referensi utama agar draf hukum itu mampu memperkuat sistem keamanan nasional. "Regulasi ini sengaja dirancang demi mewujudkan ketahanan siber nasional secara menyeluruh, kokoh, komprehensif, serta mampu melindungi segenap tumpah darah warga Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiarij mengungkapkan, Pemerintah secara resmi telah menginisiasi pembahasan RUU KKS. Langkah strategis ini diawali lewat adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri jajaran kabinet pada bulan Februari tahun 2026 demi kepentingan nasional.

Para menteri terkait ditugaskan

untuk segera membahas regulasi itu demi kepentingan nasional. Pesatnya perkembangan teknologi siber membuat ancaman terhadap negara jadi semakin nyata. "Ini memerlukan penanganan serius dari semua pihak terkait agar kedaulatan negara tetap terjaga dengan baik," terangnya.

Saat ini masyarakat tidak bisa dipisahkan dari ruang digital dalam kehidupan setiap hari. Sayangnya, ketergantungan ini memicu eskalasi ancaman siber kompleks yang berpotensi mengganggu stabilitas serta kedaulatan negara. Dampak negatif ini harus diantisipasi melalui hukum yang jelas bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.

Keterbatasan regulasi perlindungan ruang siber membuat upaya penanganan tantangan di Indonesia masih sangat kompleks. Kondisi itu diperparah lagi dengan adanya aktivitas kejahatan siber yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Karena itu harus ada payung hukum yang kuat untuk mengatasinya segera," tandasnya. ■ PYB